

***Subtle Politics* dan Legitimasi Politik-Kultural dalam Relasi Mursyid-Murid Tarekat Khalwatiyah Samman**

M. Sayful*, Zulfiani

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding Author: muhammad.sayful@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis relasi spiritual antara mursyid dan murid dalam Tarekat Khalwatiyah Samman serta konversinya menjadi pengaruh politik lokal melalui pendekatan *subtle politics* dan legitimasi kultural. Berpusat di Patte'ne, Kabupaten Maros, sebagai episentrum spiritual utama Tarekat Khalwatiyah Samman, penelitian ini mengkaji bagaimana otoritas keagamaan beroperasi dalam kontestasi demokrasi elektoral tanpa mengandalkan komando politik yang terbuka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi etnografis, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan mengintegrasikan Teori Otoritas Max Weber, Teori Modal Pierre Bourdieu, serta konsep kekuasaan terselubung Steven Lukes dan Antonio Gramsci. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama: (1) Relasi mursyid dan murid bekerja melalui mekanisme *subtle politics*, di mana pengaruh politik disampaikan secara tersirat melalui isyarat (isharah), bahasa tubuh, dan pembentukan preferensi moral murid di ruang liminal *Balla Lompo*; (2) Patte'ne berfungsi sebagai arena konversi modal spiritual menjadi modal simbolik dan politik bagi elite daerah. Dalam proses ini, lembaga tarekat bertindak sebagai penyaring moral (*moral filter*) sekaligus menerapkan politik jarak (*politics of distance*) untuk menjaga netralitas institusional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa otoritas tradisional-karismatik di Patte'ne mampu beradaptasi secara dinamis dalam ruang demokrasi lokal, membuktikan bahwa politik elektoral daerah tersintesis secara mendalam dengan tatanan nilai spiritualitas tasawuf.

Kata Kunci: *Subtle Politics*, Konversi Modal Spiritual, Legitimasi Kultural, Relasi Mursyid-Murid, Tarekat Khalwatiyah Samman

Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan sosial dan politik di Indonesia, relasi antara keagamaan, nilai-nilai spiritual, dan struktur kekuasaan senantiasa menunjukkan dinamika yang kompleks dan saling memengaruhi. Agama tidak sekadar hadir sebagai himpunan doktrin esoteris dan tata cara peribadatan pribadi, melainkan juga beroperasi sebagai basis legitimasi moral, norma budaya, serta sumber daya mobilisasi dalam ruang publik. Di Sulawesi Selatan, institusi keagamaan berbasis tarekat memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan memegang peranan krusial dalam membentuk tatanan kebudayaan serta struktur kepemimpinan masyarakat lokal. Salah satu entitas tarekat dengan jejaring jamaah yang

Article history: Received 18/6/2026; Revised 6/8/2026; Accepted 7/8/2026; Published 8/8/2026



© The Author(s), 2026.

sangat luas dan pengaruh sosial yang mengakar adalah Tarekat Khalwatiyah Samman yang berpusat di Dusun Patte'ne, Desa Temmapaduae, Kabupaten Maros. Kedudukan Patte'ne dalam lanskap keagamaan Sulawesi Selatan bukan sebatas wilayah administratif, melainkan episentrum kosmologis dan pusat gravitasi spiritual utama tempat berkedudukannya mursyid, tempat diselenggarakannya berbagai kegiatan zikir jamaah, serta pusat orientasi keagamaan (*pusa*) bagi para murid yang tersebar di berbagai daerah.

Sebagai pusat spiritual utama Tarekat Khalwatiyah Samman, Patte'ne tidak hanya menjadi ruang penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) dan pembinaan spiritualitas penganutnya, melainkan juga berkembang menjadi arena interaksi politik kebudayaan yang memiliki daya tawar sangat signifikan. Dalam setiap momentum politik lokal, seperti Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Legislatif, Patte'ne kerap menjadi panggung artikulasi politik bagi para calon pemimpin dan elite politik yang datang berkunjung. Kehadiran para aktor politik ke Patte'ne umumnya bertujuan untuk bersilaturahmi, memohon doa, serta mencari legitimasi kultural dari sosok mursyid yang dipandang memiliki kedudukan terhormat di tengah masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberadaan modal spiritual yang terakumulasi di pusat tarekat mampu memancarkan pengaruh hingga ke dalam ranah demokrasi elektoral di tingkat lokal.

Meskipun demikian, fenomena keterlibatan dan pengaruh komunitas tarekat dalam politik elektoral sering kali dipersepsikan secara dangkal oleh sebagian pengamat maupun kajian politik konvensional. Pengaruh keagamaan dalam politik kerap disederhanakan sebagai bentuk komando hierarkis kaku, patronase politik yang instruktif, atau pola relasi transaksional yang mekanis antara pimpinan keagamaan dan pengikutnya. Pandangan semacam ini mengasumsikan bahwa pilihan politik jamaah bergerak secara otomatis atas dasar perintah terbuka atau imbauan politik formal dari mursyid. Namun, realitas etnografis yang berlangsung di Patte'ne menunjukkan dinamika yang jauh lebih halus, terselubung, dan kompleks (*subtle politics*). Pengaruh politik mursyid kepada para murid tidak disampaikan melalui artikulasi politik praktis, pengerahan massa secara demonstratif, atau maklumat politik yang bersifat mengikat. Sebaliknya, pengaruh tersebut bekerja secara tenang melalui isyarat (*isharah*), nasihat etika keagamaan, serta narasi bakti spiritual yang telah terinternalisasi dalam sanubari para murid. Kepatuhan murid dalam menentukan arah sikap politiknya lahir secara sukarela berlandaskan penghormatan moral dan ketaatan spiritual yang mendalam terhadap mursyid, tanpa merasa adanya pemaksaan struktural maupun perintah doktrinal yang formal.

Untuk menguraikan kompleksitas fenomena sosial keagamaan ini secara kritis dan mendalam, penelitian ini mengintegrasikan beberapa kerangka teoretis dalam antropologi politik dan kekuasaan. Pijakan utama analisis menggunakan kerangka Teori

Otoritas Max Weber (2012) untuk membedah bagaimana perpaduan antara otoritas tradisional yang bersumber pada tradisi dan silsilah keagamaan (*sanaad*) serta otoritas karismatik yang melekat pada kepribadian mursyid melahirkan legitimasi spiritual yang kokoh di mata para pengikutnya. Selanjutnya, kerangka Teori Modal dan Arena Sosial Pierre Bourdieu (2010) digunakan untuk menguraikan bagaimana modal spiritual di pusat tarekat Patte'ne dikonversi menjadi modal simbolik serta modal politik yang bernilai tinggi bagi para elite politik yang berkunjung. Kerangka teoretis ini ditopang secara kuat oleh analisis antropolog dan sejarawan Islam, Martin van Bruinessen (2009, 2018) mengenai pelembagaan tarekat, otoritas ulama, dan dinamika politik lokal di Indonesia. Sebagai pendukung konseptual yang memperdalam analisis kekuasaan terselubung, penelitian ini merujuk pada pemikiran Steven Lukes (2018) mengenai dimensi ketiga kekuasaan (*the third dimension of power*). Lukes menegaskan bahwa bentuk kekuasaan yang paling efektif adalah kekuasaan yang bekerja secara tidak kasat mata melalui pembentukan persepsi, kesadaran, dan kerangka nilai aktor, sehingga tindakan yang diambil dirasakan sebagai pilihan moral mereka sendiri. Pandangan ini diperkuat oleh konsep hegemoni kultural Antonio Gramsci (2013), yang menjelaskan bagaimana kepemimpinan moral dan intelektual seorang figur mampu melahirkan konsensus bersama secara sukarela (*spontaneous consent*) di kalangan masyarakat tanpa memerlukan sarana koersif.

Kajian mengenai keberadaan dan pengaruh Tarekat Khalwatiyah Samman di Sulawesi Selatan telah menarik perhatian para peneliti terdahulu melalui berbagai sudut pandang. Penelusuran antropologis mendasar yang dilakukan oleh Abu Hamid (2008) berhasil memetakan sejarah tasawuf, struktur sosial, serta peran kultural tarekat dalam tatanan masyarakat Bugis Makassar. Penelusuran historis dan pemikiran yang dilakukan oleh Ubaedillah dan Subekti (2017) berhasil memetakan perkembangan awal serta perluasan jejaring sosial tarekat ini dalam konteks lokal Sulawesi Selatan. Pada aspek praktis dan doktrinal internal, Marlin (2019) memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tata cara ritual zikir, silsilah keilmuan, dan doktrin keagamaan yang menjadi pedoman hidup para jamaah. Dari perspektif sosiologi dan antropologi agama, Sabiq et al. (2023) menelaah bagaimana ajaran tasawuf mampu membangun solidaritas sosial dan keterikatan kelompok yang kuat di antara sesama pengikut tarekat. Sementara itu, kajian etnografis terkini dari Nurfajri (2024) yang mengambil lokasi di Patte'ne, Kabupaten Maros, berfokus pada analisis adaptasi sosial jamaah terhadap pendidikan formal dan dinamika modernitas, sedangkan Jufri (2025) mengamati peran moral mursyid dalam membina etika politik dan nilai-nilai kemasyarakatan di tingkat lokal.

Meskipun literatur di atas telah memberikan kontribusi akademik yang krusial dalam mendokumentasikan aspek sejarah, ritual internal, solidaritas kelompok, adaptasi

sosial, serta pembinaan etika umum, masih terdapat ruang akademis (*academic gap*) yang belum tergarap secara spesifik. Kajian-kajian terdahulu sebagian besar masih menempatkan peran tarekat pada ranah normatif-edukatif atau terbatas pada dinamika interaksi internal jamaah. Masih sangat jarang penelitian yang secara spesifik membongkar Patte'ne sebagai sebuah arena pertarungan simbolik (*symbolic arena*) dan arena politik kebudayaan, tempat mekanisme *subtle politics* serta konversi modal spiritual bekerja secara halus dalam mengarahkan kontestasi demokrasi lokal.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pemfokusan analisis antropologi kekuasaan terhadap ruang halus relasi mursyid dan murid di Patte'ne. Penelitian ini membongkar bagaimana legitimasi politik tidak diraih melalui perintah komando terbuka atau instruksi formal, melainkan diproduksi melalui pembentukan preferensi moral murid serta pengukuhan legitimasi simbolik bagi para elite politik di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam relasi spiritual antara mursyid dan murid dalam Tarekat Khalwatiyah Samman di Patte'ne melalui mekanisme *subtle politics*, serta menguraikan proses konversi modal spiritual tersebut menjadi legitimasi kultural dalam dinamika politik lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif analitis untuk membedah relasi spiritual antara mursyid dan murid serta mekanismenya dalam konteks *subtle politics* dan konversi modal di Patte'ne, Kabupaten Maros. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi makna, simbol, norma spiritual, serta dinamika interaksi sosial keagamaan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Melalui perspektif sosiologi politik dan keagamaan, penelitian ini memfokuskan perhatian pada realitas obyektif dan subyektif yang terbangun di lingkungan komunitas Tarekat Khalwatiyah Samman.

Lokus penelitian ini ditetapkan secara tunggal di Dusun Patte'ne, Desa Temapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pemilihan Patte'ne sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan purposif, mengingat Patte'ne merupakan episentrum dan pusat spiritual utama Tarekat Khalwatiyah Samman. Di lokasi inilah berpusat aktivitas kepemimpinan keagamaan, kediaman mursyid, serta tempat penyelenggaraan ritual tahunan berskala besar yang dihadiri oleh puluhan ribu jamaah dari berbagai pelosok daerah. Keberadaan Patte'ne sebagai pusat gravitasi keagamaan menjadikannya arena yang sangat strategis untuk mengamati interaksi antara modal spiritual dan kontestasi politik lokal.

Data dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yang mencakup unsur pimpinan tarekat (mursyid dan khalifah), para murid atau jamaah senior dan yunior, tokoh masyarakat Patte'ne, serta beberapa aktor politik lokal yang pernah melakukan kunjungan atau silaturahmi politik ke Patte'ne. Penentuan informan dari beragam latar belakang ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan berimbang mengenai bagaimana isyarat politik (*isharah*) diproduksi, dipersepsikan, dan direspons dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi naskah keagamaan tarekat, catatan silsilah, dokumen sejarah, artikel jurnal ilmiah, buku referensi, serta dokumen berita media massa yang relevan dengan topik penelitian.

Pembahasan

Patte'ne sebagai Episentrum Spiritual dan Otoritas Mursyid

Dusun Patte'ne yang secara administratif terletak di Desa Temmapaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, memegang kedudukan tersendiri dan tak tergantikan dalam tatanan sosioantropologis penganut Tarekat Khalwatiyah Samman di Sulawesi Selatan. Keberadaan Patte'ne melampaui makna batasan administratif atau permukiman pedesaan biasa, karena ruang geografis ini dikonstruksikan oleh para pengikutnya sebagai lanskap sakral, pusat orientasi batin, serta episentrum kosmologis utama. Ratusan ribu jamaah yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan seperti Kabupaten Maros, Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Sidrap, Soppeng, Bone, hingga wilayah yang berada di luar Negara Indonesia memandang Patte'ne sebagai poros tunggal penyatuan tatanan spiritual dan kebudayaan kolektif. Untuk membedah secara mendalam bagaimana Patte'ne terbangun sebagai arena kekuasaan simbolik dan kekuatan politik kebudayaan yang begitu dominan, bagian ini mengadopsi pendekatan antropologi politik kekuasaan. Pendekatan ini menempatkan dua kerangka teoretis utama sebagai pisau analisis paling mendasar, yaitu Teori Otoritas Max Weber (2012) dan Teori Modal serta Arena Sosial Pierre Bourdieu (2010). Kedua teori utama ini diperkuat secara signifikan oleh analisis antropologi historis Martin van Bruinessen (2009, 2018) mengenai pelem-bagaan tarekat, otoritas keagamaan, dan dinamika politik lokal di Indonesia.

Dalam kacamata antropologi ruang, konstruksi Patte'ne sebagai episentrum spiritual terwujud melalui kategorisasi budaya lokal Bugis Makassar mengenai pusa,

yakni pusat orientasi kosmologis dan tempat seluruh komitmen batin serta loyalitas kultural disandarkan. Di dalam kawasan sakral Patte'ne berdiri kompleks bangunan simbolik utama yang mencakup kediaman pimpinan tertinggi tarekat (Balla Lompo), kompleks pemakaman sakral (kubah) tempat bersemayamnya jasad para mursyid terdahulu, serta masjid utama tempat diajarkannya silsilah keilmuan dan praktik zikir jahr khas Tarekat Khalwatiyah Samman. Perjalanan fisik puluhan ribu murid menuju Patte'ne dipahami dalam antropologi sebagai pergerakan spiritual atau ritual perjalanan (*safar*) dalam rangka pembersihan jiwa (*tazkiyatun nafs*), pembaharuan janji ketaatan (*bai'at*), serta pencarian keberkahan di hadapan mursyid.

Secara etnografis dan historis, kedudukan Patte'ne sebagai pusat gravitasi spiritual dipahat oleh sejarah panjang penyebaran tasawuf di tanah Bugis Makassar sejak paruh kedua abad kesembilan belas (Abu Hamid, 2008). Konsolidasi takhta kepemimpinan tarekat secara permanen di Patte'ne dimatangkan oleh figur karismatik Syekh H. Muhammad Saleh Puang Turu, yang secara luas dihormati oleh jamaah dengan sebutan Puang Lompo. Dalam kajian antropologi tarekat di Nusantara, Martin van Bruinessen (2009, 2018) mengamati bahwa keberlangsungan tarekat sebagai kekuatan sosial politik yang bertahan lama sangat ditentukan oleh pelembagaan pusat organisasi yang solid. Di pusat tersebut, figur mursyid bertindak sebagai simpul utama pengikat jaringan solidaritas kebudayaan jamaah yang sangat luas. Bruinessen (2018) menekankan bahwa tarekat yang memiliki daya tawar politik kultural tinggi adalah tarekat yang berhasil merawat simpul-simpul tradisi lokal dan membangun aliansi strategis dengan tatanan elite aristokrasi tanpa mengorbankan kesucian otoritas keagamaan mereka. Di Patte'ne, fenomena antropologis ini terwujud secara nyata melalui relasi historis kepemimpinan tarekat dengan Kerajaan Turikale melalui Karaeng Turikale IV I Sanrima Daeng Parukka (Bruinessen, 2009, 2018). Hubungan patronase keagamaan ini membuat ajaran tarekat mampu mengakar kuat menembus sekat-sekat kelas sosial, mulai dari masyarakat petani di pedesaan hingga lingkaran bangsawan dan elite daerah.

Untuk membongkar basis legitimasi kekuasaan yang berpusat di Patte'ne, pemikiran Max Weber (2012) mengenai tipe ideal otoritas menjadi pijakan teoretis utama yang paling dominan dalam antropologi politik. Weber (2012) mengklasifikasikan otoritas ke dalam tiga tipe ideal, yakni otoritas tradisional (*traditional authority*), otoritas karismatik (*charismatic authority*), dan otoritas legal rasional (*legal-rational authority*). Dalam realitas etnografis di Patte'ne, kepemimpinan mursyid tidak beroperasi di atas hukum positif atau struktur birokrasi negara rasional, melainkan terbentuk dari sintesis hibrid yang sangat kokoh antara otoritas tradisional dan otoritas karismatik (Weber, 2012). Keabsahan kepemimpinan mursyid tidak bersumber dari legitimasi elektoral formal atau

pengangkatan administratif, melainkan dari perpaduan sempurna antara kesucian tradisi masa lalu dan kualitas esoteris pribadi sang mursyid yang diakui secara kolektif oleh kebudayaan lokal.

Sesuai dengan analisis Weber (2012) mengenai otoritas tradisional, legitimasi mursyid di Patte'ne bersumber dari ketaatan pada tatanan dan norma masa lalu yang diyakini telah ada sejak purbakala dan bersifat sakral. Otoritas tradisional ini mewujudkan dalam penguasaan silsilah keilmuan spiritual (sanad) yang sah dan tidak terputus dari pendiri Tarekat Khalwatiyah Samman di Madinah, Syekh Muhammad bin Abdul Karim as Samman, hingga bermuara pada Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana dipertegas oleh Bruinessen (2009, 2018) dalam kajiannya mengenai otoritas keagamaan Islam di Nusantara, kepemilikan sanad keilmuan yang valid merupakan fondasi utama legitimasi tradisional yang menempatkan mursyid sebagai pemegang otoritas spiritual yang tidak terbantahkan. Legitimasi tradisional mursyid di Patte'ne semakin diperkuat oleh transmisi kepemimpinan yang terikat dalam garis keturunan mulia atau pasa dari para mursyid pendahulu. Struktur kebudayaan Bugis Makassar yang sangat menjunjung tinggi adab, silsilah darah, nilai *siri na pacce*, serta ketaatan mutlak kepada figur *gurutta* (guru agama) semakin menginternalisasikan otoritas tradisional ini ke dalam tatanan nilai dan kosmologi masyarakat lokal.

Di sisi lain, dimensi otoritas karismatik (Weber, 2012) memancar secara kuat dari pengakuan kolektif murid terhadap sifat-sifat luar biasa (*extraordinary powers*) yang melekat pada pribadi mursyid. Dalam perspektif sosiologis Weber (2012), otoritas karismatik bersandar pada pengabdian para pengikut terhadap kesucian, keutamaan spiritual, atau karakter keteladanan seorang individu yang membedakannya dari manusia pada umumnya. Mursyid di Patte'ne tidak hanya dihormati karena kedudukan garis keturunannya, tetapi juga diyakini memiliki kedalaman ilmu hakikat, keluhuran akhlak, serta karunia spiritual berupa keberkahan (*barakah*) dan kemampuan supranatural (*karamah*). Sebagaimana ditunjukkan oleh Bruinessen (2018) dalam studi antropologisnya mengenai tarekat Nusantara, karisma dalam tradisi tasawuf beroperasi sebagai daya pikat esoteris yang melegitimasi kedudukan mursyid sebagai wasilah atau perantara spiritual antara hamba dengan Sang Pencipta. Mursyid dipahami oleh para murid sebagai sosok *mursyid kamil mukammil* (pembimbing yang sempurna dan memimpin menuju kesempurnaan), sehingga setiap tutur kata, nasihat, dan pandangan beliau dipercaya mengandung petunjuk ilahi. Perpaduan antara keabsahan silsilah tradisional dan daya pikat karismatik ini menciptakan tingkat kepatuhan kultural murid yang sangat solid, mengakar, dan sulit tergoyahkan oleh kontestasi politik luar.

Pilar teoretis utama kedua yang sama krusialnya dalam membedah fenomena kekuasaan di Patte'ne adalah Teori Modal dan Arena Sosial Pierre Bourdieu (2010). Dalam kajian antropologi politik modern, kerangka pemikiran Bourdieu memuat penjelasan bahwa masyarakat terbagi ke dalam berbagai arena sosial (*fields*) yang berfungsi sebagai ruang pertarungan antaraktor untuk memperebutkan, mengakumulasi, dan mengonversikan berbagai bentuk modal (*capital*). Bourdieu membagi modal ke dalam empat kategori dasar, yaitu modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Dalam kerangka analisis tersebut, Patte'ne beroperasi sebagai sebuah arena keagamaan (*religious field*) sekaligus arena politik kebudayaan terspesialisasi, tempat mursyid bertindak sebagai pemilik modal paling dominan.

Modal utama yang terakumulasi di Patte'ne adalah modal spiritual, yang dikonseptualisasikan oleh Bradford Verter (2003) sebagai bentuk perluasan dari modal budaya keagamaan (*religious cultural capital*) Bourdieu. Modal spiritual ini mencakup penguasaan doktrin esoteris, otoritas mengajarkan amalan zikir jahr, silsilah sanad, serta kapasitas memancarkan barakah. Dalam kerangka teoretis Bourdieu, modal spiritual yang melimpah ini terkonversi secara efektif menjadi modal simbolik (*symbolic capital*) melalui pengakuan dan legitimasi yang diberikan oleh komunitas murid. Modal simbolik didefinisikan sebagai bentuk modal apa saja yang dipersepsikan dan diakui secara sah oleh para aktor dalam arena sosial, sehingga menjelma menjadi prestise, kehormatan, wibawa, dan otoritas moral. Karena mursyid menguasai modal spiritual yang begitu tinggi, beliau memegang modal simbolik yang sangat dominan. Modal simbolik inilah yang melahirkan kekuasaan simbolik (*symbolic power*), yakni kekuasaan tidak kasat mata untuk membentuk realitas, menetapkan norma, dan mengarahkan perilaku murid tanpa perlu menggunakan instrumen paksaan fisik atau kekerasan struktural.

Selain modal spiritual dan modal simbolik, kedudukan Patte'ne sebagai arena kekuasaan juga ditopang oleh akumulasi modal sosial (*social capital*) yang sangat luas. Sejalan dengan analisis antropolog Islam, Martin van Bruinessen (2009, 2018), mengenai jaringan tarekat di Asia Tenggara, modal sosial mursyid terwujud dalam bentuk jejaring hubungan sosial yang rapat, terstruktur, dan terpelembagakan. Jejaring ini mencakup ratusan ribu murid, para khalifah di berbagai daerah, pengurus tarekat, hingga ikatan kekeluargaan dengan elite politik dan aristokrasi lokal. Jejaring sosial ini diikat oleh rasa persaudaraan (*ukhuwah*) dan komitmen spiritual bai'at. Dalam kerangka pemikiran Bourdieu, modal sosial yang efektif memerlukan pemeliharaan secara terus-menerus melalui ritus pertukaran simbolik dan interaksi kebudayaan yang berkala.

Proses reproduksi otoritas Weberian dan akumulasi modal Bourdieuan di Patte'ne berlangsung secara masif melalui perhelatan ritus kolektif tahunan. Setiap penye-

lenggaraan peringatan Haul untuk mengenang para mursyid terdahulu, perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw, serta pelaksanaan Zikir Akbar di Patte'ne menjadi arena utama reproduksi performatif otoritas dan konversi modal tersebut. Ratusan ribu murid berbondong-bondong secara sukarela melakukan mobilisasi kebudayaan menuju Patte'ne. Di sana, mereka melakukan ziarah ke kompleks makam sakral dan melakukan *tabarruk* (mengalap berkah) dengan menjabat serta mencium tangan mursyid Tarekat Khalwatiyah Samman.

Masih dalam kerangka teoretis Bourdieu (2010), gestur mencium tangan dan menundukkan badan di hadapan mursyid merupakan wujud nyata dari habitus ketaatan yang tertubuhkan (*embodied habitus*). Disposisi batin dan gestur tubuh ini terinternalisasi dalam diri murid melalui latihan spiritual dan sosialisasi kebudayaan berkepanjangan. Ritus kolektif zikir jahr yang membahana di Patte'ne menciptakan kondisi kecamuk emosional kolektif yang meleburkan stratifikasi sosial sementara. Di dalam ruang sakral tersebut, para pejabat pemerintah, politisi, pengusaha, hingga rakyat biasa duduk bersila sejajar sebagai ikhwan di hadapan mursyid. Pengalaman emosional dan transendental bersama ini menegaskan kembali kedudukan mursyid sebagai pemilik modal simbolik tertinggi dan pemegang otoritas karismatik-tradisional yang tunggal (Weber, 2012; Bourdieu, 2010; Bruinessen, 2018). Sinergi antara otoritas tradisional dan karismatik Weber dengan penguasaan modal spiritual, simbolik, dan sosial Bourdieu pada akhirnya melahirkan basis ketaatan kebudayaan yang sangat mengakar dan melimpah secara nyata ke dalam ranah kehidupan kemasyarakatan serta politik kewargaan.

Praktik Subtle Politics dan Hegemoni Kultural dalam Relasi Mursyid dan Murid

Dinamika keterlibatan dan pengaruh politik Tarekat Khalwatiyah Samman di Patte'ne tidak beroperasi melalui pola komando hierarkis yang kaku, pengerahan massa secara demonstratif, atau instruksi politik praktis yang bersifat terbuka dan formal. Kajian antropologi politik memperlihatkan bahwa relasi antara mursyid dan murid dalam merespons dinamika ruang publik bekerja melalui mekanisme *subtle politics* atau politik halus. Mekanisme ini bertumpu pada ranah komunikasi simbolik, kepekaan bahasa tubuh, derajat kehangatan penyambutan tamu, wejangan etika kemasyarakatan, serta doa yang dipanjatkan oleh mursyid di kediamannya (*Balla Lompo*). Dalam kerangka pemikiran Max Weber (2012) dan Pierre Bourdieu (2010), komunikasi politik ini tidak diartikulasikan melalui wacana hukum rasional yang lugas, melainkan dipancarkan melalui otoritas karismatik dan kekuasaan simbolik (*symbolic power*). Seluruh gestur, hening, raut wajah, serta interaksi nonverbal mursyid dipersepsikan secara kolektif oleh para murid bukan sekadar sebagai tindakan sosial biasa, melainkan sebagai bentuk petunjuk

esoteris atau isyarat spiritual (*isharah*) yang memiliki bobot moral dan kekuasaan simbolik sangat tinggi.

Dalam studi antropologi agama dan politik, Martin van Bruinessen (2009, 2018) mengamati bahwa pimpinan tarekat di Indonesia sering kali menerapkan strategi politik jarak (*politics of distance*), di mana pemegang otoritas spiritual secara sadar menghindari keterlibatan langsung dalam politik praktis untuk merawat daya tawar kultural mereka. Fenomena ini terlihat jelas di Patte'ne ketika momentum kontestasi politik lokal seperti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Maros maupun Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan berlangsung. Patte'ne senantiasa menduduki posisi yang sangat strategis sebagai tujuan utama safari politik para calon pemimpin untuk memperebutkan legitimasi kultural. Dalam situasi demikian, mursyid di Patte'ne secara konsisten menjaga jarak independensi institusional tarekat dari keterlibatan partai politik praktis. Mursyid tidak pernah menerbitkan maklumat tertulis, tidak memasang atribut kampanye, dan tidak mengarahkan pilihan jamaah secara eksplisit kepada figur kandidat tertentu. Penjagaan marwah institusional ini dilakukan secara ketat untuk merawat kesucian ruang sakral Patte'ne agar tidak terseret ke dalam pembelahan politik duniawi yang bersifat pragmatis dan transaksional (Bruinessen, 2018).

Namun demikian, di balik pintu terbuka *Balla Lompo*, mursyid menerima setiap tamu politik dengan adab keagamaan dan protokol kebudayaan yang luhur. Dalam tatanan antropologis Bugis Makassar, *Balla Lompo* bukan sekadar rumah tinggal, melainkan ruang liminal dan panggung arena simbolik tempat nilai-nilai spiritual dan kekuasaan sekuler bertemu. Mursyid menyambut para politisi dalam bingkai tradisi murni, mulai dari penyajian hidangan penghormatan, perbincangan mengenai permasalahan dan kesejahteraan umat, hingga sesi doa bersama. Di ruang kultural inilah mursyid menyampaikan nasihat etis mengenai kriteria kepemimpinan yang adil, jujur, serta amanah. Isyarat simbolik, seperti durasi penerimaan, posisi duduk, bahasa tubuh, nada suara, dan tingkat kehangatan sikap mursyid, ditangkap oleh para murid sebagai kompas moral dan petunjuk kultural dalam menentukan arah sikap politik mereka di bilik suara.

Praktik *subtle politics* ini mengakar kuat pada tatanan nilai dan etika keagamaan (adab) murid terhadap mursyid dalam tradisi tasawuf yang tersintesis secara harmonis dengan nilai-nilai kebudayaan lokal Bugis Makassar. Doktrin ketaatan murid yang terangkum dalam prinsip *sam'an wa tha'atan* (mendengar dan taat) serta sikap *ta'z'him* (penghormatan mendalam) berkelindan dengan tatanan etika lokal seperti *pappaseng* (wasiat kebaikan leluhur), *lemphu* (kejujuran), *acca* (cendekia), *sipakatau* (saling menghargai sesama manusia), *sipakalebbi* (saling memuliakan), serta *siri na pacce* (harga diri, kepedu-

lian, dan solidaritas kemanusiaan). Dalam lanskap sosioantropologis ini, mursyid dipandang sebagai sosok yang menduduki puncak kearifan moral dan bimbingan spiritual. Oleh karena itu, petunjuk mursyid tidak memerlukan instrumen formal berupa perintah doktrinal yang kaku atau mobilisasi politik yang kasar. Murid yang matang secara spiritual dituntut memiliki kepekaan batin (*basirah*) untuk memahami kehendak mursyid yang tersirat dalam simbol-simbol halus. Kepekaan batin ini beroperasi sebagai habitus yang terinternalisasi (Bourdieu, 2010), sehingga murid menyelaraskan pilihan mereka tanpa merasa adanya paksaan structures maupun intimidasi institusional.

Untuk membedah secara mendalam bagaimana mekanisme politik halus ini bekerja secara efektif tanpa memicu resistensi atau penolakan, pemikiran Steven Lukes (2018) mengenai dimensi ketiga kekuasaan (*the third dimension of power*) yang dipadukan dengan Teori Modal Bourdieu (2010) serta Otoritas Weber (2012) ditempatkan sebagai kerangka teoretis utama. Lukes (2018) menggarisbawahi bahwa bentuk kekuasaan yang paling canggih dan bertahan lama adalah kekuasaan yang bekerja secara tidak kasat mata (*covert power*) tanpa harus memicu konflik atau konfrontasi terbuka. Dalam konteks Patte'ne, kekuasaan dimensi ketiga ini beroperasi melalui pembentukan persepsi, pemaknaan, dan kerangka nilai para murid. Pembentukan persepsi ini tidak terjadi secara mendadak menjelang pemilu, melainkan melalui proses sosialisasi nilai dan pembinaan kerohanian yang berlangsung bertahun-tahun. Mursyid tidak perlu menggunakan perintah politik terbuka untuk mengarahkan suara jamaah, karena otoritas karismatik (Weber, 2012) dan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 2010) yang dipancarkan secara konsisten telah membentuk kesadaran internal murid. Kesadaran internal inilah yang memandu murid untuk secara spontan menyelaraskan preferensi politik mereka dengan kecenderungan moral sang mursyid.

Penjelasan teoretis tersebut diperkuat oleh pilar konsep hegemoni kultural Antonio Gramsci (2013) serta temuan Martin van Bruinessen (2018) mengenai kepemimpinan moral ulama. Gramsci (2013) menjelaskan bahwa hegemoni yang solid dan berkelanjutan dibangun bukan melalui sarana koersif atau paksaan fisik, melainkan melalui kepemimpinan moral dan intelektual (*moral and intellectual leadership*) yang melahirkan konsensus bersama secara sukarela (*spontaneous consent*). Kepemimpinan mursyid di Patte'ne merupakan wujud nyata hegemoni kultural yang berakar pada kepercayaan tanpa ragu dari jamaah bahwa arahan dan isyarat mursyid senantiasa berorientasi pada kemaslahatan umat serta keselamatan dunia dan akhirat (Gramsci, 2013; Bruinessen, 2018). Mursyid dipersepsikan memiliki keikhlasan niat yang murni (*mukhlis*) dan terbebas dari ambisi kekuasaan pragmatis, sehingga konsensus yang lahir dari nasihat mursyid diterima sebagai panduan luhur yang wajib dijunjung tinggi. Hegemoni ini

mampu melampaui hegemoni politik sekuler karena berakar pada keyakinan iman yang sangat mendalam dan terpatni dalam kehidupan sehari-hari para pengikut tarekat.

Penerjemahan isyarat spiritual (*isharah*) menjadi sikap politik kolektif di tingkat akar rumput berlangsung melalui transmisi jejaring sosial keagamaan yang sangat rapat dan terstruktur secara kultural (Bourdieu, 2010; Bruinessen, 2009). Usai seorang tokoh politisi melakukan kunjungan silaturahmi ke Patte'ne, narasi mengenai suasana pertemuan tersebut disampaikan secara berkala melalui saluran-saluran informal tarekat. Para khalifah yang menjadi wakil mursyid di berbagai daerah, para *khadim* (pembantu senior), serta murid-murid senior memegang peranan kunci sebagai agen penafsir kebudayaan (*hermeneutic agents*). Mereka mendiskusikan pesan moral, kesan umum, hingga kehormatan penyambutan mursyid terhadap tamu yang berkunjung. Informasi dan kesan ini kemudian mengalir secara organik dalam percakapan harian di majelis-majelis zikir, halqah mingguan, hingga ruang-ruang sosial warga di tingkat desa. Transmisi lisan ini bekerja sangat cepat dan efektif karena didukung oleh ikatan modal sosial persaudaraan sesama murid (*ukhuwah*) yang sangat solid.

Berbagai indikator simbolik yang nampak selama kunjungan politisi di Patte'ne ditafsirkan secara cermat oleh para penafsir kultural tersebut. Indikator etnografis seperti durasi tatap muka, posisi tempat duduk di *Balla Lompo*, ekspresi wajah mursyid, hingga kekhusyukan doa yang dipanjatkan dimaknai secara kolektif sebagai bentuk restu kultural (*spiritual blessing*). Jika seorang kandidat disambut dengan senyuman hangat, diajak berbincang di ruang dalam, serta didoakan secara khusus dengan menyebutkan nama dan hajatnya, hal tersebut ditangkap sebagai isyarat positif akan kelayakan figur tersebut. Sebaliknya, penerimaan yang bersifat formalitas di serambi luar tanpa doa khusus ditafsirkan sebagai bentuk netralitas atau penegasan pesan etis semata. Melalui akumulasi pemaknaan sosial yang terorganisir secara halus ini, modal spiritual mursyid terkonversi secara mulus menjadi legitimasi kultural dan orientasi politik bersama di antara para murid (Bourdieu, 2010).

Pada akhirnya, mekanisme *subtle politics* dan hegemoni kultural ini menegaskan kedudukan Patte'ne sebagai poros kekuatan politik kebudayaan yang sangat menentukan arah dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Maros dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Keunggulan dari model *subtle politics* ini terletak pada kemampuannya untuk memelihara keutuhan internal jamaah. Ketika persaingan politik elektoral berpotensi memecah belah masyarakat, keheningan dan isyarat halus mursyid justru berfungsi sebagai penyeimbang yang mencegah polarisasi tajam di antara para pengikut. Dengan tidak secara eksplisit memihak kepada satu partai politik, mursyid mampu merawat independensi tarekat sekaligus mempertahankan modal simbolik dan daya tawar kultural

yang sangat tinggi di hadapan seluruh kekuatan politik. Dengan demikian, *subtle politics* bukan sekadar strategi komunikasi politik, melainkan sebuah seni kepemimpinan spiritual dan praktik kekuasaan kebudayaan yang menyatukan prinsip kesucian tarekat dengan realitas keterlibatan sosial-politik dalam masyarakat kontemporer.

Konversi Modal Spiritual Mursyid Menjadi Legitimasi Kultural Elite Politik

Proses interaksi antara elite politik dan pusat keagamaan di Patte'ne mencapai muaranya pada mekanisme konversi modal (*capital conversion*), tempat nilai-nilai spiritual yang diproduksi oleh lembaga tarekat ditransformasikan menjadi legitimasi politik yang konkret dalam kontestasi demokrasi lokal. Pierre Bourdieu (2010) mengemukakan bahwa modal tidak bersifat statis, melainkan dapat ditukarkan (*fungible*) dari satu bentuk ke bentuk lainnya sesuai dengan aturan permainan dalam arena sosial (*field*) yang bersangkutan. Elite politik yang datang berkunjung ke Patte'ne membawa modal ekonomi (seperti dana kampanye dan sumber daya logistik) serta modal politik formal (dukungan partai dan jabatan birokrasi), namun mereka sering mengalami defisit modal simbolik dan kultural di mata pemilih berbasis keagamaan. Untuk menutupi defisit tersebut, para aktor politik melakukan safari kultural ke Patte'ne guna mengonversi modal spiritual (*spiritual capital*) milik mursyid menjadi modal simbolik (*symbolic capital*) dan modal politik (*political capital*) bagi diri mereka sendiri (Bourdieu, 2010; Verter, 2003).

Secara etnografis, perjumpaan di kediaman mursyid (*Balla Lompo*) beroperasi sebagai panggung pertunjukan politik simbolik yang sarat akan pesan performatif (Geertz, 2017; Kertzer, 2014). Para politisi yang datang secara sadar melakonkan pertunjukan kerendahan hati melalui gestur menunduk, menjabat, dan mencium tangan mursyid, sedangkan mursyid menampilkan sikap tenang, netral, dan tidak tergiur oleh tawaran kekuasaan sekuler. Kedudukan Balla Lompo dapat dibedah sebagai ruang liminal melalui konsep Victor Turner (2017), tempat status politik sekuler dan jabatan resmi yang disandang para pejabat ditanggihkan untuk sementara waktu, sehingga mereka berhadapan langsung dengan pemegang otoritas keagamaan tertinggi di atas tatanan adab tarekat. Konversi modal ini juga bekerja melalui pendekatan antropologi sensorik dan materialitas agama (*material religion*), di mana derajat penerimaan mursyid ditangkap lewat penanda material (*material markers*) yang intuitif, seperti kehangatan teh manis atau hidangan makanan yang dikeluarkan dari dapur *Balla Lompo*, aroma wewangian di ruang tamu, kekhusyukan doa yang dipanjatkan, hingga posisi tempat duduk politisi. Rincian mikro-etnografis ini dibaca oleh khalayak sebagai sinyal visual mengenai seberapa dalam restu spiritual yang diberikan oleh mursyid, yang kemudian disebarkan ke media massa

serta percakapan warga sebagai konstruksi realitas bahwa kandidat tersebut telah memperoleh *spiritual blessing*.

Dalam kacamata Max Weber (2012), peristiwa ini merupakan bentuk transfer karisma secara simbolik (transfer of charisma), di mana pemilih mengasosiasikan kelayakan moral calon pemimpin dengan kesucian otoritas tradisional-karismatik yang dimiliki sang mursyid. Legitimasi kultural ini berfungsi sebagai tameng simbolik (*symbolic shield*) yang efektif untuk menangkis isu-isu miring dan tuduhan kecatatan moral dalam pertarungan politik lokal. Sebagaimana digarisbawahi oleh Martin van Bruinessen (2009, 2018), pemanfaatan jaringan keagamaan oleh elite politik bertujuan untuk memangkas biaya transaksi politik (*political transaction costs*) dan membangun tingkat kepercayaan (*trust*) yang instan di kalangan pemilih akar rumput. Transmisi sinyal politik ini diperkuat melalui saluran infrapolitik dan wacana lisan (*vernacular discourse*), sebagaimana dirumuskan oleh James C. Scott (2000). Usai perjumpaan di *Ballu Lompo* selesai, informasi dan kesan umum mengenai penyambutan mursyid mengalir secara organik melalui perbincangan informal di ruang-ruang tersembunyi, seperti di sela-sela majelis zikir, halqah mingguan, pos ronda, hingga warung kopi. Ketika seorang kandidat dipandang telah mengantongi isyarat positif dari mursyid, para khalifah dan murid senior secara organik mengonsolidasikan dukungan di tingkat lokal tanpa perlu membentuk struktur tim sukses formal yang berbiaya mahal, karena modal sosial berupa jaringan persaudaraan tarekat secara otomatis tergerakkan oleh dorongan moral dan solidaritas kelompok (Bourdieu, 2010).

Praktik konversi modal spiritual dan mekanisme *subtle politics* (politik halus) di Patte'ne membawa implikasi ganda yang sangat mendalam terhadap dinamika demokrasi lokal di Kabupaten Maros dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Di satu sisi, fenomena ini memberikan implikasi positif berupa penguatan stabilitas sosial dan pelem-bagaan etika dalam politik elektoral. Demokrasi lokal tidak beroperasi dalam ruang hampa yang murni rasional-atomistik, melainkan tersintesis secara harmonis dengan tatanan nilai kebudayaan dan keagamaan lokal. Kehadiran mursyid dan lembaga tarekat bertindak sebagai penyaring moral (*moral filter*) yang menuntut para kandidat politik untuk tetap menjaga adab, kesantunan, serta komitmen terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Dalam pandangan Antonio Gramsci (2013) dan Steven Lukes (2018), konsensus politik yang lahir dari ruang-ruang spiritual ini menciptakan stabilitas sosial dan mencegah munculnya konflik antarfaksi yang merusak tatanan kemasyarakatan, karena masyarakat mengikatkan preferensi politik mereka pada komando moral kolektif yang dihormati bersama. Selain itu, keheningan dan isyarat halus mursyid berfungsi se-

bagai penyeimbang yang mencegah polarisasi tajam di antara jamaah tatkala persaingan politik elektoral memanans.

Di sisi lain, dominasi konversi modal spiritual ini juga membawa implikasi krusial yang menjadi tantangan bagi pendewasaan demokrasi prosedural. Ketergantungan elite politik pada legitimasi simbolik mursyid berisiko menggeser fokus kontestasi demokrasi dari adu gagasan, program kerja rasional, dan rekam jejak kinerjanya menjadi sekadar pertarungan perebutan pengaruh dan pencitraan simbolik di hadapan tokoh agama. Pemilih yang mendasarkan pilihannya semata-mata pada isharah spiritual sang mursyid berpotensi mengabaikan evaluasi kritis terhadap kapasitas kepemimpinan teknokratis para calon pejabat publik. Meskipun demikian, implikasi negatif ini mampu diredam oleh konsistensi mursyid di Patte'ne dalam menjaga politik jarak (*politics of distance*) dan netralitas institusional (Bruinessen, 2018). Mursyid tidak pernah menjual otoritas keagamaan demi kepentingan pragmatis jangka pendek atau menyerahkan dukungan tunggal kepada partai politik tertentu, sehingga mencegah terjadinya devaluasi modal spiritual tarekat. Dengan demikian, Patte'ne tetap berdiri kokoh tidak hanya sebagai benteng penyucian jiwa, tetapi juga sebagai episentrum legitimasi politik kebudayaan yang menjaga keseimbangan antara kesucian tradisi keagamaan dan realitas demokrasi lokal.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Patte'ne sebagai episentrum spiritual Tarekat Khalwatiah Samman melampaui batas geografis dan berkembang menjadi arena politik kebudayaan yang sangat determinan di Sulawesi Selatan. Otoritas mursyid yang berpusat di Patte'ne terbentuk dari sintesis hibrid antara otoritas tradisional (yang ditopang oleh kesucian silsilah keilmuan atau sanad serta tatanan adab Bugis Makassar) dan otoritas karismatik yang melekat pada keluhuran pribadi, barakah, serta kedalaman ilmu esoteris sang mursyid (Weber, 2012; Bruinessen, 2018). Penguasaan modal spiritual ini secara otomatis bertransformasi menjadi modal simbolik dan modal sosial yang terakumulasi secara masif melalui pelembagaan jaringan jamaah serta perhelatan ritus kolektif tahunan seperti Haul dan Zikir Akbar, yang mengukuhkan Patte'ne sebagai poros gravitasi moral dan sosial masyarakat (Bourdieu, 2010).

Mekanisme keterlibatan politik di Patte'ne tidak beroperasi melalui instruksi komando kaku, pengerahan massa yang instruktif, atau pola relasi transaksional yang mekanis, melainkan melalui praktik *subtle politics* (politik halus). Pengaruh politik mursyid dipancarkan secara tersirat melalui bahasa tubuh, derajat kehormatan penerimaan tamu

di *Balla Lompo*, wejangan etika keagamaan, serta isyarat spiritual (*isharah*). Beroperasinya kekuasaan halus ini mengonfirmasi pemikiran Lukes (2018) mengenai dimensi ketiga kekuasaan (*covert power*) dan hegemoni kultural Gramsci (2013). Pembentukan preferensi politik para murid berlangsung secara sukarela (*spontaneous consent*) berlandaskan ketaatan spiritual, kesadaran etis, serta penghayatan atas nilai-nilai lokal seperti *siri na pacce*, *sipakatan*, dan *sipakalebbi*, tanpa merasakan adanya pemaksaan *structures*. Transmisi sinyal politik tersebut diproduksi secara efektif melalui saluran infrapolitik dan wacana lisan (*vernacular discourse*) di ruang-ruang informal jamaah (Scott, 2000).

Proses konversi modal spiritual (*capital conversion*) menjadi legitimasi politik terbukti menjadi instrumen krusial bagi para elite politik untuk menutupi defisit modal simbolik mereka dalam kontestasi demokrasi lokal (Bourdieu, 2010; Verter, 2003). Perjumpaan simbolik di *Balla Lompo* sebagai ruang *liminal* (Turner, 2017) memungkinkan terjadinya transfer karisma (Weber, 2012) yang menganugerahkan tameng simbolik (*symbolic shield*) bagi para calon pemimpin. Fenomena ini membawa implikasi ganda terhadap demokrasi lokal. Di satu sisi, kehadiran Patte'ne bertindak sebagai penyaring moral (*moral filter*) yang meredam polarisasi tajam dan menuntut para kandidat untuk memelihara adab serta kepedulian terhadap kemaslahatan publik. Di sisi lain, fenomena ini menghadirkan tantangan berupa risiko pergeseran fokus kontestasi dari adu gagasan teknokratis menjadi sekadar perburuan legitimasi simbolik. Meskipun demikian, konsistensi mursyid dalam menjaga politik jarak (*politics of distance*) dan netralitas institusional berhasil mencegah devaluasi modal spiritual tarekat (Bruinessen, 2018).

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dengan menegaskan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal tidak beroperasi dalam ruang hampa yang murni rasional-atomistik, melainkan tersintesis secara mendalam dengan tatanan nilai spiritualitas tasawuf, reproduksi modal simbolik, dan kebudayaan masyarakat Sulawesi Selatan. Implikasi praktis penelitian ini menuntut adanya pendewasaan pendidikan politik di akar rumput, sehingga masyarakat mampu menyelaraskan penghormatan spiritual kepada pimpinan keagamaan dengan evaluasi kritis terhadap kapasitas, rekam jejak, dan program kerja teknokratis para calon pejabat publik demi keberlanjutan pembangunan daerah.

Pernyataan Keaslian

Kami dengan ini menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil karya orisinal yang bebas dari indikasi plagiarisme, dan untuk itu kami telah mencantumkan seluruh sumber ilmiah dan referensi yang digunakan di dalam artikel ini. Selain itu, kami juga meny-

takan bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan sebelumnya, maupun dikirimkan ke penerbit jurnal lainnya.

Referensi

- Bourdieu, P. (2010). *Distinction: A social critique of the judgement of taste* (R. Nice, Trans.). Routledge.
- Bruinessen, M. van. (2009). *Rakyat kecil, Islam, dan politik*. Gadjah Mada University Press.
- Bruinessen, M. van. (2018). *Kitab kuning, pesantren, dan tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Gading Publishing.
- Geertz, C. (2017). *Negara teater: Kerajaan-kerajaan di Bali abad kesembilan belas* (A. R. S. Supriyanto, Penerj.). IRCiSoD.
- Gramsci, A. (2013). *Sejarah dan budaya: Catatan-catatan dari penjara* (A. F. Hidayat, Penerj.). Resist Book.
- Hamid, A. (2008). *Syekh Yusuf Makassar: Seorang ulama, sufi, dan pejuang*. Yayasan Obor Indonesia.
- Jufri. (2025). Peran moral mursyid dalam pembinaan etika politik masyarakat di Kabupaten Maros. *Jurnal Kebudayaan dan Politik Lokal*, 12(1), 45–58.
- Kertzer, D. I. (2014). *Ritual, politics, and power*. Yale University Press.
- Lukes, S. (2018). *Kekuasaan: Sebuah pandangan radikal* (Edisi terjemahan). Resist Book.
- Marlin. (2019). *Doktrin dan ritus zikir Tarekat Khawlatiyah Samman di Sulawesi Selatan* [Tesis magister, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Nurfajri. (2024). Adaptasi sosial jamaah Tarekat Khalwatiyah Samman Patte'ne terhadap modernitas pendidikan. *Jurnal Antropologi Agama*, 8(2), 112–128.
- Sabiq, A., Ismail, M., & Syarif, A. (2023). Solidaritas sosial dan integrasi kelompok jamaah tarekat di Sulawesi Selatan. *Jurnal Sosiologi Agama*, 17(1), 89–104.
- Scott, J. C. (2000). *Senjatanya orang-orang yang kalah: Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari kaum tani* (A. Rahman, Penerj.). Yayasan Obor Indonesia.
- Turner, V. (2017). *Proses ritual: Struktur dan anti-struktur* (Edisi terjemahan). IRCiSoD.
- Ubaedillah, A., & Subekti, A. (2017). *Sejarah dan jejaring Tarekat Khawlatiyah Samman di Sulawesi Selatan*. LIPI Press.
- Verter, B. (2003). Spiritual capital: Theorizing religion with Bourdieu. *Sociological Theory*, 21(2), 150–174.
- Weber, M. (2012). *Sosiologi agama* (Edisi terjemahan). IRCiSoD.

